

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

No.	Nama (Tahun)	Judul/Jurnal	Objek/Variabel/ Analisis	Hasil
1	Aliniar dan Wahyuni (2017)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> pada Perusahaan Terdaftar di BEI	<p>Objek: perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2015</p> <p>Variabel: IV: Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) DV: Kualitas Pengungkapan <i>Sustainability Report</i></p> <p>Teknik Analisis: regresi linier berganda.</p>	<p>Proporsi komisaris independen dan kepemilikan saham institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan <i>sustainability report</i>.</p> <p>Ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, kepemilikan saham terkonsentrasi dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan <i>sustainability report</i>.</p>

2. Aniktia dan Khafid (2015) Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*
- Objek:** perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2013
- Variabel:**
- IV: *Good Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan
- DV: Pengungkapan *Sustainability Report*
- Teknik Analisis:** regresi logistik
- komite audit, *governance committee* dan *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.
3. Rudyanto dan Siregar (2018) The Effect of Stakeholder Pressure and Corporate Governance on the Quality of Sustainability Report
- Objek:** perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
- Variabel:**
- IV: Tekanan *Stakeholder* dan Tata Kelola Perusahaan
- DV: Kualitas Laporan Keberlanjutan
- Tekanan dari lingkungan dan konsumen positif signifikan terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Tekanan dari karyawan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Tekanan dari

		Teknik Analisis:	regresi berganda	pemegang saham tidak berpengaruh pada kualitas laporan keberlanjutan.
				Efektivitas dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan dan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh pada kualitas laporan keberlanjutan.
4	Safitri dan Saifudin (2019)	Implikasi Karakteristik Perusahaan dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	Objek: perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI periode 2014-2016 Variabel: IV: Karakteristik Perusahaan dan <i>Good Corporate Governance</i> DV: Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	Jumlah rapat komite audit dan <i>governance committee</i> berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> . Profitabilitas, likuiditas, <i>leverage</i> , aktivitas perusahaan, ukuran perusahaan dan dewan komisaris tidak berpengaruh

Analisis:	signifikan
analisis regresi	terhadap
logistic	pengungkapan
	sustainability
	report.

B. Tinjauan Pustaka

1. Teori Stakeholder

Stakeholder theory menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan entitas itu sendiri tetapi entitas juga harus memberikan manfaat bagi *stakeholder* antara lain pemegang saham, kreditor, konsumen, suplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain. *Stakeholder* merupakan semua pihak, baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi perusahaan atau dipengaruhi oleh perusahaan secara langsung maupun tidak langsung. Perusahaan harus menjaga hubungan dengan *stakeholder*-nya dengan memfasilitasi keinginan dan kebutuhan *stakeholder*-nya (Ghozali dan Chariri, 2007). GRI (2014) mendefinisikan bahwa *stakeholder* adalah individu yang diperkirakan akan terpengaruh secara signifikan oleh kegiatan, produk, atau jasa organisasi pelapor atau yang tindakannya diperkirakan akan memengaruhi kemampuan organisasi dalam menerapkan strategi atau mencapai tujuannya. Para pemangku kepentingan dapat mencakup antara lain karyawan dan pekerja lainnya, pemegang saham, pemasok, kelompok rentan, masyarakat lokal, dan LSM atau organisasi masyarakat sipil lainnya. Perusahaan harus memahami harapan dan

kepentingan *stakeholder*. Sehingga, dalam menyusun laporan perusahaan dapat mengidentifikasi apakah topik tersebut penting atau tidak.

Tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu manajer perusahaan mengerti lingkungan *stakeholder* mereka dan melakukan pengelolaan dengan lebih efektif di antara keberadaan hubungan-hubungan di lingkungan perusahaan mereka. Namun demikian, tujuan yang lebih luas dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu manajer perusahaan dalam meningkatkan nilai dari dampak aktifitas-aktifitas mereka, dan meminimalkan kerugian-kerugian bagi *stakeholder*. Pada kenyataannya, inti keseluruhan teori *stakeholder* terletak pada apa yang akan terjadi ketika perusahaan dan *stakeholder* menjalankan hubungan mereka (Kiswanto, 2017).

Pengungkapan laporan berkelanjutan merupakan salah satu strategi untuk menjaga hubungan dengan para *stakeholder* dan *shareholders* perusahaan misal, menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial dan lingkungannya sekaligus kepada seluruh pemangku kepentingan perusahaan. Perusahaan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan serta mampu mengelola *stakeholder* agar mendapatkan dukungan dari para *stakeholder* yang mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Sehingga, dengan adanya usaha perusahaan dalam memenuhi kewajiban perusahaan kepada *stakeholder*, perusahaan juga harus memberikan laporan berkelanjutan yang berkualitas agar bisa mendapatkan kepercayaan dari *stakeholder*.

2. *Sustainability Report*

GRI (2014) mendefinisikan bahwa *sustainability report* adalah praktik pelaporan perusahaan secara transparan mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial, baik itu kontribusinya positif ataupun negatif terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Informasi yang tersedia melalui pelaporan keberlanjutan memungkinkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk membentuk opini dan untuk membuat keputusan terinformasi tentang kontribusi organisasi pada tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sustainability reporting menurut GRI (2014) terdiri dari 3 dimensi berikut:

- a. **Ekonomi** Dimensi keberlanjutan ekonomi berkaitan dengan dampak organisasi terhadap keadaan ekonomi bagi pemangku kepentingannya, dan terhadap sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global.
- b. **Lingkungan** Dimensi keberlanjutan lingkungan berkaitan dengan dampak organisasi pada sistem alam yang hidup dan tidak hidup, termasuk tanah, udara, air, dan ekosistem. Kategori lingkungan meliputi dampak yang terkait dengan *input* (seperti energi dan air) dan *output* (seperti emisi, efluen, dan limbah), termasuk juga keanekaragaman hayati, transportasi, dan dampak yang berkaitan dengan produk dan jasa, serta kepatuhan dan biaya lingkungan.
- c. **Sosial**
 - 1) **Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja** Indikator praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan kerja meliputi lapangan pekerjaan, kondisi pekerja (jumlah, komposisi gender, pekerja purna waktu dan

paruh waktu), relasi buruh dengan 15 manajemen, keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan, pendidikan, pengembangan karyawan, serta keberagaman dan peluang.

- 2) Hak Asasi Manusia Indikator kinerja hak asasi manusia menentukan bahwa organisasi harus selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dengan memperhatikan asas kesetaraan yang meliputi praktik investasi dan pengadaan, praktik manajemen, penerapan prinsip nondiskriminasi, kebebasan mengikuti perkumpulan, tenaga kerja anak, pemaksaan untuk bekerja, praktik pendisiplinan, praktik pengamanan, dan hak-hak masyarakat adat.
- 3) Masyarakat Indikator kinerja masyarakat memperhatikan dampak organisasi terhadap masyarakat dimana mereka beroperasi, dan reaksi dari institusi sosial kaitannya dengan kepedulian dan pengelolaan isu-isu seperti komunitas, korupsi, kebijakan publik, serta perilaku anti kompetitif seperti anti-*trust* dan monopoli.
- 4) Tanggungjawab atas Produk Indikator kinerja tanggung jawab atas produk mencakup aspek seperti kesehatan keselamatan dari pengguna produk dan pelanggan pada umumnya, produk dan jasa, komunikasi untuk pemasaran, serta *customer privacy*.

Saat ini penerapan *sustainability report* di dukung oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mana setiap perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis harus bertanggungjawab kepada *stakeholder* tidak hanya dalam hal kinerja keuangan perusahaan tetapi juga pertanggungjawaban perusahaan terhadap

lingkungan, ekonomi dan dampak sosial. Selain itu, OJK juga mengeluarkan regulasi Nomor 51/POJK.03/2017 Pasal 2 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, bahwasannya OJK mewajibkan lembaga jasa keuangan (LJK), Emiten, dan perusahaan yang sudah *go public* untuk menerapkan *Sustainability Report*. Otoritas Jasa Keuangan meminta perusahaan mengikuti Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).

3. Tekanan Stakeholder

Menurut KNKG (2010) perusahaan dalam menjalankan bisnis harus memperhatikan etika bisnis, artinya perusahaan harus mementingkan keberlangsungan usaha dan juga kepentingan *stakeholder*. Pemangku kepentingan memiliki hak pada perusahaan untuk menyediakan informasi tentang bagaimana aktivitas organisasi mempengaruhi *stakeholder*, bahkan ketika *stakeholder* memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan ketika *stakeholder* tidak dapat secara langsung melaksanakan peran dalam kelangsungan hidup organisasi. Fernandez-Feijoo *et al.* (2014) dan Rudyanto dan Siregar (2018) membagi *stakeholder* kedalam empat kategori industri. Berdasarkan tekanan pemangku kepentingan utama, empat kategori industri antara lain lingkungan, investor, pelanggan, dan karyawan.

Menurut Fernandez-Feijoo *et al.* (2014) Perusahaan yang kegiatan operasionalnya berhubungan langsung dengan lingkungan cenderung akan mendapat tekanan yang lebih besar dari kelompok lingkungan dan masyarakat. Sehingga, perusahaan yang tingkat kepekaan terhadap lingkungan tinggi

cenderung akan melaporkan kegiatan sosial sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan. Rudyanto dan Siregar (2018) mengatakan bahwa investor adalah kelompok yang memiliki tanggung jawab moral mengenai keberlangsungan usaha perusahaan, sehingga investor cenderung menekan perusahaan untuk melaporkan tanggungjawab sosial demi keberlanjutan usaha perusahaan.

Perusahaan yang produknya banyak dikenal oleh pelanggan akan lebih transparan menginformasikan dampak dari produk perusahaan terhadap lingkungan. Hal ini dikarenakan pelanggan cenderung lebih banyak memperhatikan perusahaan yang memproduksi barang tersebut, sehingga perusahaan perlu memperhatikan kegiatan operasional sesuai dengan keinginan pelanggan. Sedangkan, karyawan di dalam perusahaan merupakan aset berharga. Nilai moral yang dimiliki karyawan cenderung akan membuat mereka menekan pada perusahaan mengenai keberlanjutan perusahaan (Rudyanto dan Siregar, 2018).

4. *Good Corporate Governance*

Menurut KNKG (2006) penerapan *good corporate governance* (GCG) dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika (*ethical driven*) datang dari kesadaran individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholders*, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Di sisi lain, dorongan dari peraturan (*regulatory driven*) “memaksa” perusahaan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua pendekatan

ini memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing dan seyogyanya saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan tata kelola perusahaan yang memiliki agenda yang lebih luas lagi dimasa yang akan datang. Fokus dari akuntabilitas perusahaan yang semula masih terkonsentrasi atau berorientasi pada para pemegang saham (*stockholder*), sekarang menjadi lebih luas dan untuk tata kelola perusahaan juga harus memperhatikan kepentingan *stakeholder*. Pengungkapan (*disclosure*) terhadap aspek ekonomi (*economic*), lingkungan (*environmental*), dan sosial (*social*) sekarang ini menjadi cara bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan bentuk akuntabilitasnya kepada *stakeholder*. Hal ini dikenal dengan nama *sustainability reporting* atau *triple bottom line reporting* yang direkomendasikan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) (Aziz, 2014).

Organ perusahaan berupa dewan komisaris dan dewan direksi berperan penting terhadap keberhasilan pelaksanaan *good corporate governance*. Dewan Komisaris adalah salah satu bagian dari organ perusahaan yang mempunyai peran penting terhadap pelaksanaan GCG. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Dalam menjalankan tugasnya dewan komisaris dibantu oleh *Governance Commitee*. *Governance Committee* bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun oleh Direksi serta menilai konsistensi penerapannya,

termasuk yang bertalian dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan (KNKG, 2006).

Dewan Komisaris juga dibantu oleh komite audit. Komite audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan (KNKG, 2006).

Dewan Komisaris dapat terdiri dari Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen dan Komisaris yang terafiliasi. Jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Salah satu dari Komisaris Independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan (KNKG, 2006). Menurut Aziz (2014) semakin besar komposisi Independensi Dewan Komisaris, maka kemampuan Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan dalam rangka melindungi seluruh pemangku kepentingan dan mengutamakan perusahaan semakin objektif.

C. Pengembangan Hipotesis

1. Tekanan Stakeholder dan Kualitas Sustainability Report

Menurut *Stakeholder theory*, perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan perusahaan itu sendiri tetapi juga harus memberikan manfaat bagi *stakeholder* antara lain pemegang saham, kreditor, konsumen, suplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain. Berdasarkan tekanan Pemangku Kepentingan utama, *Stakeholder* dibagi menjadi empat kategori industri antara lain lingkungan, karyawan, konsumen, dan investor (Fernandez-Feijoo *et al.*, 2014).

Perusahaan dengan tingkat kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan cenderung memiliki kualitas laporan keberlanjutan yang tinggi pula. Hal ini disebabkan karena adanya tekanan dari kelompok lingkungan (seperti Greenpeace) dan masyarakat pada umumnya. Masyarakat dan kelompok-kelompok lingkungan menuntut perusahaan untuk mereklamasi kembali bumi yang telah rusak akibat dari kegiatan operasional perusahaan. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, perusahaan berusaha untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan laporan mereka transparan (Rudyanto dan Siregar, 2018).

Kekayaan intelektual yang dimiliki oleh karyawan adalah hal yang dapat mempengaruhi kualitas laporan berkelanjutan perusahaan. Semakin tinggi nilai moral dari karyawan tersebut, maka semakin tinggi juga tekanan yang diberikan karyawan kepada perusahaan dalam hal keberlanjutan perusahaan. Sehingga, nilai moral yang dimiliki karyawan dapat mempengaruhi kualitas *sustainability report*. Kemudian, Perusahaan dengan kedekatan konsumen yang tinggi cenderung akan menghasilkan laporan keberlanjutan yang berkualitas. Perusahaan tersebut

dianggap memperoleh tekanan dari konsumen, sehingga perusahaan perlu memperhatikan tindakan mereka dalam kegiatan operasional yang sesuai dengan keinginan konsumen. Perusahaan yang barang produksinya banyak dikenal konsumen cenderung akan menginformasikan dampak dari produk tersebut terhadap lingkungan (Rudyanto dan Siregar, 2018).

Menurut Rudyanto dan Siregar (2018) Semenjak berkembangnya investasi yang bertanggungjawab secara sosial, banyak pemegang saham mempertanyakan tentang bagaimana keberlanjutan perusahaan. Orang yang berhak mengambil keputusan mengenai keberlanjutan perusahaan adalah pemegang saham mayoritas yang diputuskan saat rapat umum pemegang saham. Perusahaan yang memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi cenderung akan memiliki laporan keberlanjutan yang berkualitas tinggi, dikarenakan pemegang saham dominan memiliki tanggungjawab moral yang sama. Selain itu, dengan melakukan pengungkapan *sustainability report* yang berkualitas perusahaan juga dapat memperoleh kepercayaan dari pemegang saham. Semakin tinggi minat pemegang saham terhadap laporan berkelanjutan, perusahaan cenderung meningkatkan kualitas dari laporan keberlanjutan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Fernandez-Feijoo *et al.* (2014) menemukan bahwa tekanan yang diberikan *Stakeholder* baik dari lingkungan, karyawan, konsumen, dan investor berpengaruh meningkatkan kualitas transparansi *Sustainability Report*.

Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian sebelumnya dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 = Tekanan *Stakeholder* berpengaruh terhadap Kualitas *Sustainability Report*.

2. *Good Corporate Governance* dan Kualitas *Sustainability Report*

Prinsip GCG antara lain menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *Stakeholders*-nya. perusahaan harus memperhatikan *Stakeholder*-nya sesuai dengan aturan yang ada sehingga kerjasama antara perusahaan dengan *Stakeholder* tetap berlangsung. *Sustainability Report* merupakan konsekuensi yang harus diungkapkan perusahaan dari implementasi konsep dan mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG)(Aziz, 2014).

Dewan komisaris merupakan salah satu organ perusahaan yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG. Dewan Komisaris terdiri dari Dewan Komisaris Independen dan Dewan Komisaris Terafiliasi. Jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundangundangan (KNKG, 2006).

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Komite Audit dan *Govenance Committee*. Komite Audit bertugas untuk memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan pengendalian internal dengan baik. Sedangkan *Governance Committee* bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang serta menilai konsistensi penerapannya,

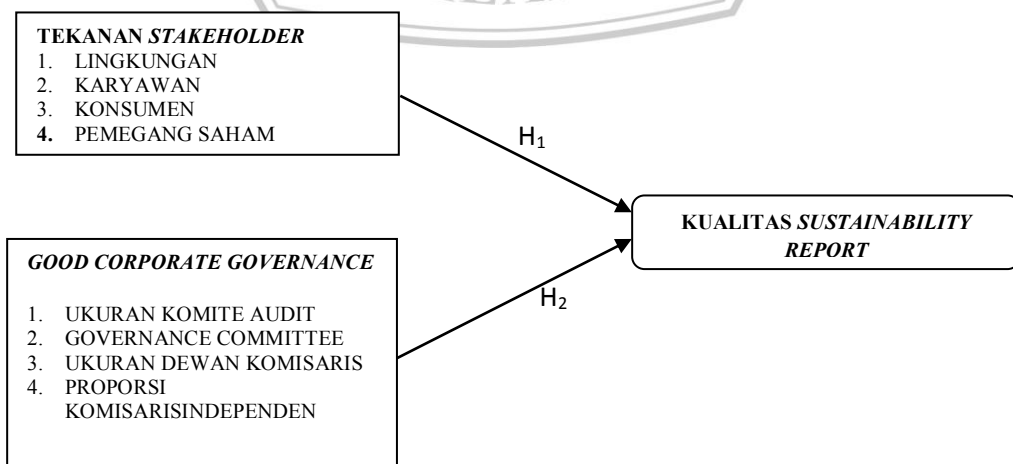
termasuk yang berhubungan dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Safitri dan Saifudin (2019) menunjukkan bahwa mekanisme GCG berupa Komite Audit dan *Govenance Committee* berpengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability Report*. Hasil penelitian yang dilakukan Aliniar dan Wahyuni (2017) menunjukkan bahwa Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Kualitas *Sustainability Report*. Selanjutnya, Utari (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh Dewan Komisaris terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dewan Komisaris dapat mempengaruhi pengungkapan tanggungjawab sosial.

Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian sebelumnya dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 = *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Kualitas *Sustainability Report*.

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Model Penelitian